



**PEMERINTAH KOTA  
TANJUNGPINANG**



**RENJA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat serta karuniaNYA kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak, yang nantinya akan berguna dan membantu Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga akan terselenggara pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel. Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama secara maksimal. Penyusunan Rencana Kerja ini tentu ada kekurangan/kelemahan, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan yang lebih baik.

Tanjungpinang, Agustus 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Tanjungpinang



SAMSUDI, S.Sos., M.H  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720906 199403 1 006

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Peningkatan keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di wilayah Pemerintah Kota Tanjungpinang pada khususnya serta pembangunan Regional dan Nasional pada umumnya yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja OPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan

awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja OPD, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
3. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif OPD;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra OPD, dan RPJMD, bagi RKA Perubahan OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

## **1.2 Landasan Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

- 3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.
- 4) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah.
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- 12)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 13)Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klafisikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 14)Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
- 15)Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026.
- 16)Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 17)Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023.
- 18)Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Kota Tanjungpinang.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang yaitu:

- 1)Sebagai pedoman untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Tanjungpinang.

- 2)Menjadi alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.
- 3)Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.
- 4)Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen perencanaan.
- 5)Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dan sebagai dasar penentuan KUA dan PPAS, serta RKA Tahun Anggaran 2023.

#### **1.4 Sistematika Penulisan Renja Perangkat Daerah.**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa and Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2023.

##### **Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang tahun lalu dan capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

##### **Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang telahaan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang

##### **Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah

## **Bab V Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Evaluasi adalah untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja periode sebelumnya, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dan pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.

Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

##### **2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

###### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

###### **1. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :**

1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 0,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau tidak terserap sebesar 0%. Indikator kinerja adalah terbayarnya jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan, dimana target 100% tidak terpenuhi. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja tersebut dikarenakan terjadi refocusing anggaran dalam upaya pencegahan covid-19 yang mana terjadi pergeseran anggaran sebelumnya Rp. 1.098.000,- menjadi Rp. 0,- sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

###### **2. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :**

2.1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel dengan pagu anggaran sebesar Rp. 0,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau tidak terserap sebesar 0%. Indikator kinerja adalah terpenuhinya

kebutuhan pemeliharaan mebel selama 12 bulan, dimana target 100% tidak terpenuhi. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja tersebut dikarenakan terjadi refocusing anggaran dalam upaya pencegahan covid-19 yang mana terjadi pergeseran anggaran sebelumnya Rp. 2.879.000,- menjadi Rp. 0,- sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

2.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 0,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau tidak terserap sebesar 0%. Indikator kinerja adalah terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya selama 12 bulan, dimana target 100% tidak terpenuhi. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja tersebut dikarenakan terjadi refocusing anggaran dalam upaya pencegahan covid-19 yang mana terjadi pergeseran anggaran sebelumnya Rp. 31.720.000,- menjadi Rp. 0,- sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

### **.2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

#### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.1. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.792.100,- dan realisasi sebesar Rp. 15.905.530,- atau terserap sebesar 94,72%. Indikator kinerja adalah menghasilkan dokumen laporan kinerja OPD. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya perencanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan OPD. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan bidang-bidang terkait, serta tim bekerja secara optimal.

2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 2.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 51.150.000,- dan realisasi sebesar Rp. 50.226.000,- atau terserap sebesar 98,19%. Indikator kinerja adalah peningkatan pelayanan administrasi kantor. Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas OPD beserta atribut kelengkapannya. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : dengan terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas OPD dapat meningkatkan kinerja para pegawai untuk bekerja secara optimal.
- 2.2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.500.000,- atau terserap sebesar 25,00%. Indikator kinerja adalah terlaksananya diklat bagi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan administrasi kantor. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : agar para pegawai memiliki pengetahuan untuk dapat meningkatkan pelayanan administrasi kantor.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - 3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 83.307.128,- dan realisasi sebesar Rp. 75.819.700,- atau terserap sebesar 91,01%. Indikator kinerja adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan administrasi kantor. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : meningkatkan pelayanan administrasi kantor.
  - 3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.358.700,- dan realisasi sebesar Rp. 9.264.750,- atau terserap sebesar 89,44%. Indikator kinerja adalah tersedianya peralatan rumah tangga. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan administrasi kantor. Faktor pendorong atas

tercapainya target kinerja tersebut adalah : meningkatkan pelayanan administrasi kantor.

3.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 48.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 38.400.000,- atau terserap sebesar 80,00%. Indikator kinerja adalah terpenuhinya kebutuhan bahan logistik. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan administrasi kantor. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : meningkatkan pelayanan administrasi kantor.

3.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 72.812.600,- dan realisasi sebesar Rp. 44.284.900,- atau terserap sebesar 60,82%. Indikator kinerja adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan administrasi kantor. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : meningkatkan pelayanan administrasi kantor.

3.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 15.705.000,- atau terserap sebesar 52,35%. Indikator kinerja adalah terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan administrasi kantor. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : meningkatkan pelayanan administrasi kantor.

3.6. Penyediaan Bahan Material dengan pagu anggaran sebesar Rp. 660.000,- dan realisasi sebesar Rp. 220.000,- atau terserap sebesar 33,33%. Indikator kinerja adalah tersedianya kebutuhan bahan/material. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan administrasi kantor. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : meningkatkan pelayanan administrasi kantor

3.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 205.433.400,- dan realisasi sebesar Rp. 155.459.584,- atau terserap sebesar 75,67%. Indikator kinerja adalah tersedianya kebutuhan

penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan administrasi kantor. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : meningkatkan pelayanan administrasi kantor.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

4.1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan pagu anggaran sebesar Rp.140.350.000,- dan realisasi sebesar Rp. 103.675.000,- atau terserap sebesar 99,35%. Indikator kinerja adalah tersedianya mebel. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya sarana dan prasarana pemerintah. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : meningkatkan pelayanan administrasi kantor.

4.2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 359.400.000,- dan realisasi sebesar Rp. 353.885.000,- atau terserap sebesar 98,47%. Indikator kinerja adalah tersedianya peralatan dan mesin lainnya. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya sarana dan prasarana pemerintah. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : meningkatkan pelayanan administrasi kantor.

4.3. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 199.980.000,- dan realisasi sebesar Rp. 199.078.000,- atau terserap sebesar 99,55%. Indikator kinerja adalah tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya sarana dan prasarana pemerintah. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : meningkatkan pelayanan administrasi kantor.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 56.040.000,- dan realisasi sebesar Rp. 54.400.000,- atau terserap sebesar 97,07%. Indikator kinerja adalah tersedianya terbayarnya tagihan komunikasi, sumber daya

air dan listrik. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan administrasi kantor. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : meningkatkan pelayanan administrasi kantor.

5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 278.999.920,- dan realisasi sebesar Rp. 278.999.920,- atau terserap sebesar 100,00%. Indikator kinerja adalah terbayarnya jasa pelayanan umum kantor. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan administrasi kantor. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : meningkatkan pelayanan administrasi kantor.

6. Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 121.860.000,- dan realisasi sebesar Rp. 89.659.200,- atau terserap sebesar 73,58%. Indikator kinerja adalah terbayarnya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan administrasi kantor. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : meningkatkan pelayanan administrasi kantor.

6.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 37.336.000,- dan realisasi sebesar Rp. 31.471.000,- atau terserap sebesar 84,29%. Indikator kinerja adalah terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan administrasi kantor. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : meningkatkan pelayanan administrasi kantor.

## **B. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - 1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 177.285.606,- dan realisasi sebesar Rp. 173.203.670,- atau terserap sebesar 97,70%. Indikator kinerja adalah jumlah koordinasi/rapat yang dilaksanakan. Hasil kegiatan ini adalah terpeliharanya kerukunan antar suku. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan bidang-bidang terkait, baik secara formal dan informal, serta tim bekerja secara optimal.

**C. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
  - 1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.409.935.646,- dan realisasi sebesar Rp. 1.409.562.146,- atau terserap sebesar 99,97%. Indikator kinerja adalah jumlah koordinasi/rapat yang dilaksanakan. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pengurus partai politik sebanyak 80 di Kota Tanjungpinang. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan,

koordinasi dengan bidang-bidang terkait, serta tim bekerja secara optimal.

1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Poltiik di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 45.404.175,- dan realisasi sebesar Rp. 43.658.240,- atau terserap sebesar 96,15%. Indikator kinerja adalah jumlah laporan situasi politik terkini. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya informasi situasi politik terkini di Kota Tanjungpinang. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : adanya laporan dengan pihak-pihak yang terkait situasi politik terkini di Kota Tanjungpinang.

#### **D. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

1.1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 49.889.483,- dan realisasi sebesar Rp. 41.431.390,- atau terserap sebesar 83,05%. Indikator kinerja adalah tersedianya program kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya kulaitas dan pemahaman program kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi

dengan FKUB, baik secara formal dan informal, serta tim bekerja secara optimal.

1.2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 126.926.900,- dan realisasi sebesar Rp. 111.741.140,- atau terserap sebesar 88,04%. Indikator kinerja adalah jumlah koordinasi FKUB yang difasilitasi. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya fasilitasi FKUB dalam peningkatan kerukunan antar umat beragama di Kota Tanjungpinang. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan FKUB, baik secara formal dan informal, serta tim bekerja secara optimal.

1.3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 366.897.900,- dan realisasi sebesar Rp. 325.148.196,- atau terserap sebesar 88,62%. Indikator kinerja adalah jumlah koordinasi LAM yang difasilitasi pertemuan. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya peran LAM dalam ketahanan, ekonomi, social, budaya dan agama. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan LAM, baik secara formal dan informal, serta tim bekerja secara optimal.

## **E. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

1.1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan

Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.384.600,- dan realisasi sebesar Rp. 8.175.410,- atau terserap sebesar 97,51%. Indikator kinerja adalah jumlah laporan dalam penyusunan rencana aksi penanganan konflik sosial. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya koordinasi antar anggota tim terpadu penanganan konflik sosial. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : koordinasi antar tim terpadu penanganan konflik bekerja secara optimal.

1.2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 162.384.800,- dan realisasi sebesar Rp. 154.744.668,- atau terserap sebesar 95,30%. Indikator kinerja adalah terlaksananya rapat koordinasi dan dialog dengan masyarakat serta pelstihan deteksi dini lanjutan bagi pengurus FKDM Kota Tanjungpinang. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya koordinasi dengan masyarakat. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, serta koordinasi dengan masyarakat dikecamatan bekerja secara optimal.

1.3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 109.509.000,- dan realisasi sebesar Rp. 106.027.750,- atau terserap sebesar 96,82%. Indikator kinerja adalah jumlah laporan hasil monitoring tim kewaspadaan dini pemerintah daerah Kota Tanjungpinang. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya informasi terkait tentang ATHG (Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan). Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan

arahan yang intens dilaksanakan, serta koordinasi dengan tim.

### **2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :**

Seluruh program/kegiatan tidak ada yang melebihi target, karena semuanya sesuai dengan rencana target yang telah ditentukan.

MATRIKS EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (SESUAI HASIL PEMETAAN/PRMUTAKHIRAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90/KEPMEN 050-3708)	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR (DOK/BULAN / PERSEN TASE)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD-P DENGAN APBD-P TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI				REALISASI KINERJA TAHUN 2021 PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2021 (%)	
			RKPD-P		APBD-P		TW I		TW II		TW III		TW IV					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.632.943.910		7.662.923.039		699.629.568		2.029.259.451		2.786.613.105		1.871.432.016		7.386.934.140	99,15	96,40
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																		
1.05 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.343.550.806		5.206.304.929		686.291.128		1.825.009.471		1.264.838.129		1.237.102.802		5.013.241.530	95,75	96,29
	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga administrasi keuangan dan tenaga pendukung	%	100				25		25		25		25		100			
	Persentase realisasi keuangan perangkat daerah	%	96.40				8.57		24.35		31.29		32.19		96.40			
	Persentase sarana dan prasarana	%	100				0		80		8.57		0		88.57			



1.05	1	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya diklat bagi pegawai sesuai tugas dan fungsi	orang	2	10.000.000	2	10.000.000	1	-	0	2.500.000	-	1	2.500.000	50,00	25,00			
																		75,00	86,22			
																		S	T			
1.05	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					463.771.828		450.571.828		33.645.250		49.901.634		92.406.200		163.200.850		339.153.934		
1.05	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	83.307.128	12	83.307.128	3	17.903.050	3	2.640.000	3	11.893.200	3	43.383.450	12	75.819.700	100,00	91,01
1.05	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	10.358.700	12	10.358.700	3	-	3	4.621.100	3	2.190.100	3	2.453.550	12	9.264.750	100,00	89,44
1.05	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik	bulan	12	48.000.000	12	48.000.000	3	7.100.000	3	9.444.000	3	8.400.000	3	13.456.000	12	38.400.000	100,00	80,00
1.05	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	bulan	12	72.812.600	12	72.812.600	3	-	3	10.156.300	3	5.104.000	3	29.024.600	12	44.284.900	100,00	60,82
1.05	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	3	-	3	6.150.000	3	3.625.000	3	5.930.000	12	15.705.000	100,00	52,35
1.05	1	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya kebutuhan bahan/material	bulan	12	660.000	12	660.000	3	-	3	-	3	220.000	3	-	12	220.000	100,00	33,33
1.05	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya kebutuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	bulan	12	218.633.400	12	205.433.400	3	8.642.200	3	16.890.234	3	60.973.900	3	68.953.250	12	155.459.584	100,00	75,67
																		100,00	75,27			

																			ST	T		
1.05	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					663.589.000		663.730.000		-		416.658.000		230.780.000		9.200.000		656.638.000		
1.05	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	paket	6	104.350.000	6	104.350.000	0	-	4	70.180.000	2	33.495.000		0	6	103.675.000	100,00	99,35
1.05	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	buah	28	359.259.000	28	359.400.000	0	-	23	147.400.000	1	197.285.000		9.200.000	24	353.885.000	85,71	98,47
1.05	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	paket		199.980.000	1	199.980.000	0	-	1	199.078.000		0		0	1	199.078.000	100,00	99,55
1.05	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
																			95,24	98,93		
																			ST	ST		
1.05	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				335.016.880		335.039.920		53.233.320		89.729.980		83.329.980		107.106.640		333.399.920			
1.05	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	56.040.000	12	56.040.000	3	8.400.000	3	12.480.000	3	16.080.000	3	17.440.000	12	54.400.000	100,00	97,07
1.05	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terbayarnya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	12	0	12	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0,00	0,00
1.05	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	bulan	12	278.976.880	12	278.999.920	3	44.833.320	3	77.249.980	3	67.249.980	3	89.666.640	12	278.999.920	100,00	100,00
																			100,00	99,51		
																			ST	ST		

1.05	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					159.196.000		159.196.000		9.196.000		254.300		17.550.500		94.129.400		121.130.200									
1.05	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarnya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	bulan	12	121.860.000	12	121.860.000	3	-	3	254.300	3	14.250.500	3	75.154.400	12	89.659.200	100,00	73,58							
1.05	1	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan mebel	bulan	12	0	12	0	0	-	0	-	-	-	-	-	0	0	0,00	0,00							
1.05	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	bulan	12	37.336.000	12	37.336.000	3	9.196.000	3	-	3	3.300.000	3	18.975.000	12	31.471.000	100,00	84,29							
1.05	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	bulan	12	0	12	0	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0	0,00	0,00							
																					100,00	76,09							
																					ST	T							
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>																													
8.01	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>																												
8.01	02	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>																			137.085.600	177.285.606	3.373.200	44.051.680	40.650.000	85.128.790	173.203.670	100,00	97,70
					Persentase Konflik SARA Tertangani	%	100											100											

8.01	02	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				137.085.600		177.285.606		3.373.200		44.051.680		40.650.000		85.128.790		173.203.670			
8.01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah pelajar yang mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan	orang	200	0														
8.01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah masyarakat terlatih dalam penghayatan ideologi pancasila	orang	150	0														
8.01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah koordinasi/rapat yang dilaksanakan	rapat	6	137.085.600	6	177.285.606		3.373.200	1	44.051.680	4	40.650.000	1	85.128.790	6	173.203.670	100,00	97,70
																				100,00	97,70	
																				ST	ST	
8.01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.455.339.821		1.455.339.821		4.407.640		33.270.000		1.276.808.746		138.734.000		1.453.220.386		100,00	99,85

					Persentase Partai dan Ormas yang Aktif dan Memahami hak dan Kewajibannya (tidak berkonflik)	%	100												100		
					Persentase Keikutsertaan Partai Politik dan Ormas dalam Mewujudkan Demokrasi yang Aman dan Damai	%	0												0		
					Persentase Konflik Pemilu Tertangani	%	-												-		
					Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILLEG, PILPRES)	%	-												-		
8.01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				1.455.339.821	1.455.339.821	4.407.640	33.270.000	1.276.808.746	138.734.000	1.453.220.386							
8.01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	Terlaksananya koordinasi di bidang politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	rakor	2	1.409.935.646	2	1.409.935.646	0	1.300.000	2	16.896.500	1.256.365.646	135.000.000	2	1.409.562.146	100,00	99,97	

				Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
8.01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	laporan tentang situasi politik terkini	laporan	12	45404175	12	45.404.175	3	3.107.640	3	16.373.500	3	20.443.100	2	3.734.000	12	43.658.240	100,00	96,15	
																				100,00	99,85		
																				ST	ST		
8.01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						-		-											-	-	
					Keikutsertaan Anggota Paguyuban yang Pendidikan Manajemen Organisasi Lembaga Masyarakat	%	100												11.11			-	
8.01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						445.689.283		543.714.283		0		33.132.300		164.516.230		280.672.196		478.320.726	100,00	87,97	

				Persentase Pencegahan Konflik Antar Umat Beragama	%	100																
8.01	05	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjangan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				445.689.283		543.714.283		-		33.132.300		164.516.230		280.672.196		478.320.726			
8.01	05	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersedianya program kerja di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	rapat kerja	6	49.889.483	6	49.889.483	0	-	2	1.749.000	2	6.231.500	2	33.450.890	6	41.431.390	100,00	83,05
8.01	05	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah anggota tim PAKEM yang terlibat dalam komunikasi penanganan paham radikal dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat	orang	300	-									0					
8.01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Jumlah pelajar SLTP yang mendapatkan pengetahuan wawasan kebangsaan	orang	100	-									0					



				Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				78.40 0														
8.01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan dalam penyusunan rencana aksi penanganan konflik sosial	laporan	4	8.384.600	4	8.384.600	1	1.400.000	1	5.875.410	1	-	1	900.000	4	8.175.410	100,00	97,51
8.01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan 2x dialog dengan masyarakat di kecamatan	orang	300	142.984.800	300	162.384.800	20	3.257.600	160	60.792.840	120	19.400.000		71.294.228	300	154.744.668	100,00	95,30
8.01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring tim kewaspadaan dini pemerintah daerah Kota Tanjungpinang	laporan	12	99.909.000	12	109.509.000	3	900.000	3	27.127.750	3	20.400.000	3	57.600.000	12	106.027.750	100,00	96,82
																					100,00	95,96

													ST	ST		
								7.662.923.039,00								
										<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>			<b>7.386.934.140</b>			
										<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM.....)</b>			99,15	96,40		
										<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM s.d PROGRAM .....</b>			ST	ST		

## 2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga dan Teknis Daerah Kota Tanjungpinang, dan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang mempunyai tugas pokok membantu Walikota penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

- Kepala Badan;
- Sekretariat, membawahkan;
  1. Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, membawahkan :
  1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
  2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
- Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan:
  1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri
  2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
- Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahkan :
  1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
  2. Sub Bidang Penanganan Konflik
- Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b) Pemberian dukungan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c) Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d) Pelaksanaan urusan kesekretariatan badan; dan

e) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

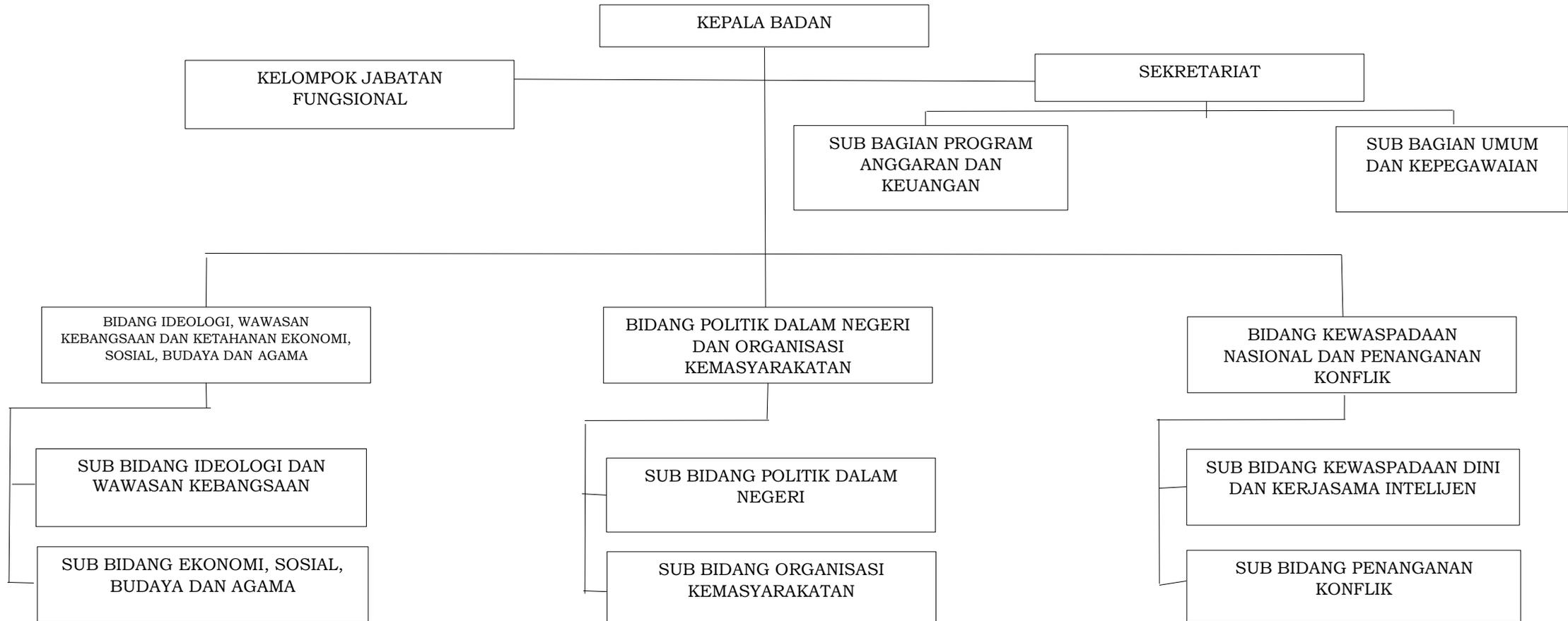
## 2.2.1 Capaian Indikator Kinerja

### Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Formula Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian pada Tahun Ke-		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)
	Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat tentang berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI											
	Terantisipasi dan penyelesaian potensi konflik Sosial (IPOLEKSOSBUDHANKAM ) sebelum menjadi konflik yang besar											
1	Persentase konflik sosial tertangani	Jumlah potensi konflik sosial tertangani dibagi jumlah potensi konflik sosial dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase konflik sosial tertangani	Jumlah potensi konflik SARA tertangani dibagi jumlah potensi konflik SARA dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Pencegahan Konflik antar Umat Beragama	Jumlah potensi konflik agama tertangani dibagi jumlah potensi konflik agama dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase keikutsertaan anggota paguyuban yang pendididkan Manajemen Organisasi Lembaga Masyarakat	Jumlah paguyuban dibagi jumlah paguyuban yang mendapatkan pendididkan Manajemen Organisasi Lembaga Masyarakat dikali 100	%	100	100	100	15	13	11,11	15	13	11,11
5	Persentase partai dan ormas yang aktif dan memahami hak dan kewajibannya (tidak berkonflik)	Persentase partai dan ormas yang aktif, dan memahami hak dan kewajibannya (tidak berkonflik) dibagi jumlah partai dan Ormas yang terdaftar dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Keikutsertaan partai politik dalam mewujudkan demokrasi yang aman dan damai	Jumlah anggota Partai Politik dan ORMAS yang aktif berdemokrasi dibagi jumlah anggota partai politik dan ORMAS yang ada di kali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

7	Persentase Konflik pemilu tertangani	Jumlah Potensi konflik pemilu tertangani di bagi dengan jumlah Potensi Konflik di kali 100	%	100	100	0	100	100	-	100	100	-
8	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	Jumlah pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) menggunakan hak pilih dibagi jumlah pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) dikali 100	%									
		- Pileg	%	70			72,97			104,24		
		- Pilpres	%	65			73,35			112,85		
		- Pilgub	%		60			62,15			103,58	
9	Persentase realisasi keuangan perangkat daerah	Jumlah realisasi keuangan perangkat daerah dibagi realisasi keuangan perangkat daerah dikali 100	%	96,20	92,80	96,40	77,71	95,53	96,40	80,78	102,94	100
10	Persentase kebutuhan tenaga administrasi keuangan dan tenaga pendukung	Jumlah kebutuhan tenaga administrasi keuangan dan tenaga pendukung di bagi jumlah yang tersedia tenaga administrasi keuangan dan tenaga pendukung dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur di bagi jumlah yang tersedia Sarana dan Prasarana Aparatur dikali 100	%	100	100	100	100	100	88,57	100	100	88,57
12	Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan tersusun tepat waktu di bagi Jumlah laporan Keuangan yang harus tersusun di kali 100	%	91	92	93	100	100	100	109,89	108,70	107,53
13	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelatihan	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pelatihan di bagi jumlah Pegawai yang ada dikali 100	%	100	100	100	50	50	50	50	50	50

# STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG



### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang**

Pada bagian ini dikemukakan isu-isu penting pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

#### **A. Isu-isu Penting terkait Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang**

1. Pengaruh dari informasi media sosial yang salah akan mengakibatkan pengaruh dan dampak yang jelek dimasyarakat dan informasi tersebut bersifat hoax, yang informasinya tidak mempunyai kebenaran yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat sehingga dapat memecah belahkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Keanekaragaman masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, etnis dan agama serta adat istiadat yang berbeda dapat menimbulkan konflik dan pertikaian dilingkungan masyarakat.
3. Rawannya kondisi Kota Tanjungpinang yang dipengaruhi letak geografis sebagai daerah transit yang berdekatan dengan negara tetangga yang akan mengakibatkan masuknya pengaruh-pengaruh asing yang bersifat negative bagi daerah maupun seluruh kedaulatan NKRI.

#### **B. Isu-isu Penting terkait Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan**

1. Belum optimalnya penyaluran dana hibah Ormas
2. Belum optimalnya kebijakan perwako terkait petunjuk pelaksanaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
3. Dianggap penting untuk membangun jaringan aplikasi yang berbasis peningkatan pelayanan pendaftaran serta informasi terhadap ormas
4. Pentingnya membangun hubungan kemitraan antara pemerintah Kota Tanjungpinang kepada seluruh ormas yang berada pada wilayah administrasi pemerintah Kota Tanjungpinang
5. Belum optimalnya pendidikan politik di masyarakat

6. Rendahnya pemahaman terhadap etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita dalam Pemilu.
7. Dukungan penyelenggaraan Pemilihan Umum

C. Isu-isu Penting terkait Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

1. Dianggap perlu untuk memberikan pelatihan kepada Pengurus FKUB untuk mewujudkan kerukunan antar agama sesuai aturan yang ada
2. Sosialisasi bahaya narkoba kepada pelajar dan masyarakat se-Kota Tanjungpinang
3. Pelaksanaan test urine bagi ASN dan masyarakat
4. Dialog tokoh agama dan masyarakat dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama
5. Pemetaan rumah ibadah di Kota Tanjungpinang
6. Pembuatan peraturan daerah P4GN Kota Tanjungpinang

D. Isu-isu Penting terkait Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

1. Dianggap perlu untuk memberikan pelatihan kepada Tim FKDM dalam memberikan dan mengumpulkan data yang akurat untuk disamakan kepada Pemerintah
2. Pentingnya untuk menerbitkan SK Walikota dan pembuatan rencana Perwako tentang FKDM agar dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

E. Permasalahan terkait Kesekretariatan

1. Belum optimalnya fasilitasi dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan
2. belum optimalnya inventarisasi ketatausahaan dan kepegawaian
3. belum optimalnya penyusunan administrasi keuangan sesuai aturan pengelolaan keuangan daerah
4. belum optimalnya penyusunan daftar Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Unit (RKPBU)

5. belum optimalnya kebijakan penyusunan dokumen berita acara pemeriksaan, pinjam pakai, penerimaan, penolakan dan pengeluaran barang-barang inventaris
6. belum optimalnya kegiatan inventarisasi asset sekretariat daerah sesuai KIB.
7. Belum optimalnya fasilitasi dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan
8. Belum optimalnya pengelolaan program anggaran dan keuangan dikarenakan adanya pergantian sistem ke SIPD
9. Belum optimalnya penyusunan administrasi keuangan dikarenakan tidak ditunjang oleh sistem yang ada/berlaku

## 2. 4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023				Hasil Kebutuhan Analisa							
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				
8				<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>											
8	01			<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				<b>13.124.646.734</b>				<b>13.124.646.734</b>			
8	01	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>5.637.059.400</b>			<b>5.637.059.400</b>			
8	01	01	2,01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>38.500.000</b>			<b>38.500.000</b>			
8	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Kota Tanjungpinang	1	16.500.000	APBD Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	1	16.500.000	APBD Kota Tanjungpinang
8	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	Kota Tanjungpinang	1	22.000.000	APBD Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	1	22.000.000	APBD Kota Tanjungpinang
8	01	01	2,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>3.809.409.959</b>			<b>3.809.409.959</b>		
8	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Kota Tanjungpinang	350	bulan 3,809,409,959	APBD Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	350	bulan 3,809,409,959	APBD Kota Tanjungpinang
8	01	01	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>90.200.000</b>			<b>90.200.000</b>		
8	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Kota Tanjungpinang	45	90.200.000	APBD Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	45	90.200.000	APBD Kota Tanjungpinang

8	01	01	2,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>873.623.300</b>				<b>873.623.300</b>	
8	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kota Tanjungpinang	5	110.000.000	APBD Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	5	110.000.000	APBD Kota Tanjungpinang
8	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kota Tanjungpinang	4	44.000.000	APBD Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	4	44.000.000	APBD Kota Tanjungpinang
8	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kota Tanjungpinang	1	77.000.000	APBD Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	1	77.000.000	APBD Kota Tanjungpinang
8	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kota Tanjungpinang	4	77.000.000	APBD Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	4	77.000.000	APBD Kota Tanjungpinang
8	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Kota Tanjungpinang	25	33,000,000	APBD Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	25	33,000,000	APBD Kota Tanjungpinang
8	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kota Tanjungpinang	12	532.623.300	APBD Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	12	532.623.300	APBD Kota Tanjungpinang
8	01	01	2,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>283.800.000</b>				<b>283.800.000</b>	
8	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0	APBD Kota Tanjungpinang			0	APBD Kota Tanjungpinang

8	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kota Tanjungpinang	11	110.000.000	APBD Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	11	110.000.000	APBD Kota Tanjungpinang
8	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kota Tanjungpinang	15	173.800.000	APBD Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	15	173.800.000	APBD Kota Tanjungpinang
8	01	01	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>366.355.000</b>				<b>366.355.000</b>	
8	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kota Tanjungpinang	1	71.500.000	APBD Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	1	71.500.000	APBD Kota Tanjungpinang
8	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kota Tanjungpinang	12	294.855.000	APBD Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	12	294.855.000	APBD Kota Tanjungpinang
8	01	01	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>175.171.141</b>				<b>175.171.141</b>	
8	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Kota Tanjungpinang	5	77.000.000	APBD Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	5	77.000.000	APBD Kota Tanjungpinang
8	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kota Tanjungpinang	3	43.171.141	APBD Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	3	43.171.141	APBD Kota Tanjungpinang

8	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kota Tanjungpinang	20	55.000.000	APBD Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	20	55.000.000	APBD Kota Tanjungpinang
8	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					0	APBD Kota Tanjungpinang			0	APBD Kota Tanjungpinang
8	01	02			<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>					<b>1.293.966.568</b>				<b>1.293.966.568</b>	
8	01	02	2,01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>					<b>1.293.966.568</b>				<b>1.293.966.568</b>	
8	01	02	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Kota Tanjungpinang	400	636.566.568	APBD Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	400	636.566.568	APBD Kota Tanjungpinang
8	01	02	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Kota Tanjungpinang	480	422.400.000	APBD Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	480	422.400.000	APBD Kota Tanjungpinang

8	01	02	2,01	06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Kota Tanjungpinang	150	235,000,000 ga	APBD Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	150	235,000,000 ga	APBD Kota Tanjungpinang
8	01	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>					<b>2.053.046.766</b>				<b>2.053.046.766</b>	
8	01	03	2,01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>					<b>2.053.046.766</b>				<b>2.053.046.766</b>	

8	01	03	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Kota Tanjungpinang	680	1.350.165.646	APBD Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	680	1.350.165.646	APBD Kota Tanjungpinang
8	01	03	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Kota Tanjungpinang	80	356.012.520	APBD Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	80	356.012.520	APBD Kota Tanjungpinang

8	01	03	2,01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	Kota Tanjungpinang	26	346.868.600	APBD Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	26	346.868.600	APBD Kota Tanjungpinang
8	01	04			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>					<b>632.000.000</b>				<b>632.000.000</b>	
8	01	04	2,01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>					<b>632.000.000</b>				<b>632.000.000</b>	
8	01	04	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	Kota Tanjungpinang	30	282.000.000	APBD Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	30	282.000.000	APBD Kota Tanjungpinang

8	01	04	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	Kota Tanjungpinang	30	350.000.000	APBD Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	30	350.000.000	APBD Kota Tanjungpinang
8	01	05			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>					<b>1.538.774.000</b>				<b>1.538.774.000</b>	
8	01	05	2,01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>					<b>1.538.774.000</b>				<b>1.538.774.000</b>	
8	01	05	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Kota Tanjungpinang	265	666.974.000	APBD Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	265	666.974.000	APBD Kota Tanjungpinang

8	01	05	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Kota Tanjungpinang	335	454.600.000	APBD Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	335	454.600.000	APBD Kota Tanjungpinang
8	01	05	2,01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	Kota Tanjungpinang	150	n 417,200,000	APBD Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	150	n 417,200,000	APBD Kota Tanjungpinang
8	01	06			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>					<b>1.969.800.000</b>				<b>1.969.800.000</b>	
8	01	06	2,01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>					<b>1.969.800.000</b>				<b>1.969.800.000</b>	

8	01	06	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Kota Tanjungpinang	40	290.000.000	APBD Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	40	290.000.000	APBD Kota Tanjungpinang
8	01	06	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Kota Tanjungpinang	1000	449.800.000	APBD Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	1000	449.800.000	APBD Kota Tanjungpinang

8	01	06	2,01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	Kota Tanjungpinang	12	430.000.000	APBD Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	12	430.000.000	APBD Kota Tanjungpinang
8	01	06	2,01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Kota Tanjungpinang	4	800.000.000	APBD Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	4	800.000.000	APBD Kota Tanjungpinang
<b>TOTAL</b>										<b>13.124.646.734</b>			<b>13.124.646.734</b>		

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

**Tanjungpinang sebagai kota yang maju, berbudaya dan sejahtera dalam harmoni, kebhinekaan masyarakat madani**

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berkarakter, berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global.
2. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, dan usaha masyarakat.
3. Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparatur yang berintegritas dan kompeten.
5. Melanjutkan pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang mengarah pada pencapaian unsur visi: **Kota yang maju**. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-3 yaitu: **Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan**, dengan tujuan : **Melestarikan seni, nilai adat dan tradisi budaya melayu dalam kehidupan masyarakat, dan meningkatkan kondusifitas wilayah** dan sasaran : **Meningkatnya partisipasi politik masyarakat**.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang**

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan perangkat daerah secara keseluruhan.

#### **Tujuan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sebagai berikut :

**“Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat tentang berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI”.**

#### **Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Terantisipasi potensi konflik Sosial dan konflik SARA sebelum menjadi konflik besar.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa,  
Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat tentang berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI		Jumlah konflik sosial dan konflik SARA	Jumlah konflik sosial dan konflik SARA	kasus	0	0	0	0	0	0	0	0
	a. Terantisipasi potensi konflik sosial dan konflik SARA sebelum menjadi konflik besar	Persentase potensi konflik sosial dan konflik SARA yang tertangani	Jumlah potensi konflik sosial dan konflik SARA yang tertangani dibagi jumlah potensi konflik sosial dan konflik SARA yang ada dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG dan PILPRES)	Jumlah pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG dan PILPRES), menggunakan hak pilih dibagi jumlah pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG dan PILPRES) dikali 100	%	-	Pilwako 60%	Pileg, Pilpres, 70%	Pilgub 60%	-	-	-	Pilwako 62%

**3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai aksi dalam pemenuhan capaian organisasi. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tanjungpinang Tahun 2023 adalah sebanyak 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :

- 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub Kegiatan :
- ◆ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - ◆ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
- ◆ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
- ◆ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
- ◆ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - ◆ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - ◆ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - ◆ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - ◆ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - ◆ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan :
- ◆ Pengadaan Mebel
  - ◆ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
- ◆ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - ◆ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
- ◆ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - ◆ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- ◆ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan Kegiatan :
    - 2.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan Sub Kegiatan :
      - ◆ Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
      - ◆ Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
      - ◆ Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
  3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dengan Kegiatan :
    - 3.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik, dengan Sub Kegiatan :
      - ◆ Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
      - ◆ Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
      - ◆ Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan Kegiatan :

4.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan Sub Kegiatan :

- ◆ Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- ◆ Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan Kegiatan :

5.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan Sub Kegiatan :

- ◆ Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- ◆ Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- ◆ Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan Kegiatan :

6.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan Sub Kegiatan :

- ◆ Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

- ◆ Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- ◆ Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- ◆ Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2023 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan serta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
										Nasional				Daerah
8														
8														
8	01													
8	01	01												
8	01	01	2,01											
8	01	01	2,01	01										
8	01	01	2,01	07										
8	01	01	2,02											
8	01	01	2,02	01										
8	01	01	2,05											
8	01	01	2,05	09										
8	01	01	2,06											
8	01	01	2,06	02										
8	01	01	2,06	03										



8	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	43.171.141		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			3 Unit	43.171.141
8	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	55.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			20 Unit	55.000.000
8	01	02			<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>						<b>1.293.966.568</b>						<b>1.006.500.000</b>
8	01	02	2,01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>						<b>1.293.966.568</b>						<b>1.006.500.000</b>
8	01	02	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				400 Orang	636.566.568	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			400 Orang	467.500.000
8	01	02	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				480 Orang	422.400.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			480 Orang	280.500.000
8	01	02	2,01	06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				150 Keluarga	235,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			150 Keluarga	258,500,000
8	01	03			<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>						<b>2.053.046.766</b>						<b>1.085.568.572</b>



8	01	04	2,01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>						632.000.000						66.000.000	
8	01	04	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			30 Orang		282.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				30 Orang	33.000.000
8	01	04	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			30 Orang		350.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				30 Orang	33.000.000
8	01	05			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>						1.538.774.000							1.047.200.000
8	01	05	2,01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>						1.538.774.000							1.047.200.000
8	01	05	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			265 Orang		666.974.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				265 Orang	651.200.000
8	01	05	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			335 Orang		454.600.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				335 Orang	357.500.000

8	01	05	2,01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				150 Lapora	n 417,200,000						Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			150 Lapora	n 38,500,000
8	01	06			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>						<b>1.969.800.000</b>										<b>1.586.420.000</b>
8	01	06	2,01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>						<b>1.969.800.000</b>										<b>1.586.420.000</b>
8	01	06	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			40 Orang		290.000.000						Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			40 Orang	319.000.000
8	01	06	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			1000 Orang		449.800.000						Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1000 Oran	g 362,120,000
8	01	06	2,01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan			12 Laporan		430.000.000						Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12 Laporan	267.300.000

					Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah											
8	01	06	2,01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			4 Dokumen	800.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4 Dokume	n 638,000,000
<b>TOTAL</b>										<b>13.124.646.734</b>							<b>6.619.338.013</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2022 memuat hasil yang ingin dicapai selama satu tahun yang tercermin dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerjanya.

Rencana Kerja yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat sebagai tolak Pukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan serta pencapaian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2023 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh staf dan pejabat struktural di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.

#### **SARAN**

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang baru akan dapat dilaksanakan apabila telah dijabarkan ke dalam suatu program kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan operasionalisasi dari rencana tersebut. Oleh karena itu dukungan dan juga kerjasama yang baik dari semua pihak akan dapat membantu dan mendorong terlaksananya rencana kerja ini dengan baik.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun merupakan gambaran satu tahun kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang sehingga apabila dalam pelaksanaan selama kurun waktu tersebut dijumpai dinamika dan perubahan, Perubahan Rencana ini dapat dievaluasi untuk diselaraskan dan disesuaikan sehingga dapat berjalan optimal.

Tanjungpinang, Agustus 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Tanjungpinang



**Samsudi S.Sos., M.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720906 199403 1 006

